Vol. 1., No. 2, Oktober 2025, pp. 49-53 ISSN (print) | (online)

Peran Kode Etik Asosiasi Bimbingan Dan Konseling Indonesia (ABKIN) dalam Membangun Layanan Bimbingan Konseling Berkualitas

Sofwan Adiputra [a,1,*], Mujiyati [b,2]

[a] Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung, Indonesia
[b] Universitas Lampung, Lampung, Indonesia
[1] sofwanadiputra@umpri.ac.id*
* Corresponding Author

Received 30 September 2025; accepted 15 Oktober 2025; published 30 Oktober 2025

ABSTRACT

Guidance and counseling services in schools and educational institutions require professional standards supported by professional ethical guidelines. The Code of Ethics published by the Indonesian Guidance and Counseling Association (ABKIN) serves as the basis for counselors to provide professional, ethical, and quality-oriented services. This Community Service Program (PkM) aims to improve the understanding and application of the ABKIN Code of Ethics among guidance and counseling teachers and school counselors so that guidance and counseling services become more qualified. The method used is a pre-test and post-test design with professional ethics training for 40 participants. The results showed an increase in the code of ethics comprehension score from an average of 65.2 (pre-test) to 83.5 (post-test). The discussion describes how increased ethical understanding influences service behavior and provides recommendations for strengthening the culture of ethics in guidance counseling services. In conclusion, the active implementation of the ABKIN Code of Ethics can contribute significantly to improving the quality of guidance counseling services in educational institutions.

KEYWORDS
Ethics
ABKIN
Counseling
Professionalism
Quality

This is an open-access article under the CC–BY-SA license

1. Pendahuluan

Layanan bimbingan dan konseling (BK) di sekolah memiliki peran strategis dalam membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal - baik secara pribadi, sosial, akademik maupun karier. Konselor atau guru BK dituntut tidak hanya menguasai kompetensi teknis tetapi juga memiliki integritas moral dan standar profesional. Di Indonesia, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) telah menetapkan Kode Etik sebagai pedoman bagi konselor untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung-jawab dan sesuai nilai-nilai etika [1]. Kode etik ini mencakup kualifikasi dan kompetensi konselor (nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan), pelaksanaan layanan profesional (kerahasiaan, setting layanan, tanggung-jawab)[2], mekanisme pelanggaran dan sanksi[3].

Dalam praktik bimbingan dan konseling, tantangan yang dihadapi konselor di lapangan semakin kompleks seiring dengan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi [4]. Konselor tidak hanya berhadapan dengan permasalahan akademik peserta didik, tetapi juga isu-isu psikososial seperti kesehatan mental, perundungan, kekerasan digital, serta dinamika keluarga yang beragam. Kondisi saat ini menuntut konselor untuk memiliki integritas profesional yang tinggi dan menjunjung nilai-nilai etika dalam setiap langkah pelayanan yang diberikan [5]. Oleh karena itu,

Vol. 1., No. 2, Oktober 2025, pp. 49-53 ISSN (print) | (online)

kode etik ABKIN menjadi acuan moral sekaligus pedoman hukum dalam menjaga profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi konselor [6]. Penerapan kode etik tidak hanya sekadar kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga refleksi dari kualitas layanan konseling itu sendiri. Konselor yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika seperti kerahasiaan, kompetensi, kejujuran, dan tanggung jawab professional, sehingga mampu menciptakan hubungan konseling yang aman, empatik, dan efektif[7]. Sebaliknya, pelanggaran terhadap etika dapat menurunkan kredibilitas profesi serta merugikan klien secara psikologis maupun sosial [7]. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan, organisasi profesi, dan praktisi BK untuk memperkuat pemahaman dan penerapan **kode etik ABKIN** sebagai fondasi utama dalam membangun layanan BK yang berkualitas dan berintegritas[8].

Namun, dalam praktik layanan BK di sekolah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan kode etik masih belum optimal. Salah satu hasil penelitian menunjukkan adanya pemahaman yang rendah terhadap kode etik profesi konselor yang dapat mengakibatkan malpraktik layanan BK[9]. Dengan demikian, kegiatan PkM ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman guru BK terhadap Kode Etik ABKIN, dan mengevaluasi efeknya terhadap persepsi kualitas layanan BK di institusi Pendidikan[10].

2. Metode

a. Desain
Penelitian ini menggunakan **desain *kuasi-eksperimen pre-test* dan *post-test*** tanpa kelompok kontrol. Peserta diberikan pelatihan tentang Kode Etik ABKIN kemudian dilakukan pengukuran sebelum dan sesudah.

b. Sampel
Populasi: guru BK dan konselor sekolah dari lima sekolah menengah di wilayah Pringsewu.
Sampel: sebanyak **N = 40 peserta** (8 guru BK dari masing-masing sekolah).

c. Instrumen
Instrumen terdiri dari kuesioner pemahaman kode etik (skala 1-100) yang disusun berdasarkan dimensi kode etik ABKIN (kompetensi, kerahasiaan, tanggung-jawab, konflik kepentingan, setting layanan). Validitas dan reliabilitas diuji (*Cronbach's* $\alpha = 0{,}87$).

d. Prosedur
1. *Pre-test* dilaksanakan satu hari sebelum pelatihan.
2. Pelatihan dilaksanakan selama 1 hari (6 jam) meliputi: pengenalan Kode Etik ABKIN, diskusi studi kasus, simulasi layanan etis.
3. *Post-test* dilaksanakan satu minggu setelah pelatihan.
4. Analisis data menggunakan *paired sample t-test* untuk melihat perubahan skor.

e. Analisis data
Data dianalisis statistik. Diketahui rata-rata dan standar deviasi *pre-test* dan *post-test*, serta signifikansi perbedaan ($\alpha = 0{,}05$).

f. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dalam kegiatan ini dilakukan untuk menilai efektivitas pelatihan serta peningkatan pemahaman peserta mengenai penerapan **Kode Etik ABKIN** dalam praktik layanan bimbingan dan konseling. Evaluasi dilakukan melalui tiga tahap, yaitu **evaluasi reaksi, evaluasi pembelajaran, dan evaluasi hasil**. Pada tahap **evaluasi reaksi,** peserta diminta mengisi kuesioner kepuasan terhadap materi, metode penyampaian, dan relevansi kegiatan terhadap kebutuhan profesional mereka. Tahap **evaluasi pembelajaran** dilakukan dengan membandingkan hasil **pretest dan posttest** untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta

JPETA: Jurnal Pendidikan dan Teknologi bagi Masyarakat 2025
ISSN (print) | (online) Vol. 1., No. 2, Oktober 2025, pp. 49-53

mengenai prinsip-prinsip etika profesi ABKIN. Sementara itu, **evaluasi hasil** dilakukan dengan meninjau perubahan perilaku profesional dan sikap etis peserta dalam menjalankan praktik bimbingan dan konseling setelah kegiatan berakhir.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil kegiatan pelatihan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap kode etik ABKIN.

Tabel 1. Penilaian Aspek Kode Etik

No	Aspek Penilaian	Peningkatan (%)
1	Pemahaman prinsip dasar kode etik ABKIN	35
2	Penerapan nilai profesional dalam layanan BK	40
3	Kemampuan menjaga kerahasiaan konseli	30
4	Kesadaran terhadap tanggung jawab profesi	38
5	Etika komunikasi konselor-konseli	42

Secara keseluruhan, hasil *pretest* menunjukkan rata-rata skor sebesar **58**, sedangkan hasil *posttest* meningkat menjadi **85**. Dengan demikian, terdapat peningkatan pemahaman peserta sebesar **27 poin** atau **46,5%**, yang menunjukkan efektivitas pelatihan kode etik ABKIN dalam meningkatkan kompetensi etis guru BK. Peningkatan tertinggi terjadi pada aspek **etika komunikasi konselor -konseli (42%)**, yang menunjukkan bahwa peserta mampu memahami pentingnya sikap empatik, penggunaan bahasa yang sopan, dan kepekaan dalam interaksi konseling. Peningkatan signifikan juga terlihat pada aspek **penerapan nilai profesional (40%)** dan **kesadaran tanggung jawab profesi (38%)**, menandakan bahwa peserta mulai memahami peran penting etika dalam menjaga martabat profesi konselor. Sementara itu, peningkatan pada aspek **kemampuan menjaga kerahasiaan konseli (30%)** menunjukkan perlunya penguatan lebih lanjut melalui supervisi dan studi kasus. Hal ini penting karena kerahasiaan merupakan salah satu prinsip utama dalam kode etik ABKIN yang harus diterapkan secara konsisten di lingkungan sekolah.

Secara umum, hasil pelatihan ini menegaskan bahwa penguasaan dan penerapan kode etik tidak hanya bergantung pada pengetahuan teoretis, tetapi juga pada pembiasaan profesional dan refleksi etis yang berkelanjutan. Pelatihan semacam ini berkontribusi besar terhadap pembentukan layanan BK yang berkualitas, berintegritas, dan sesuai dengan standar etika profesi konselor di Indonesia.

Tabel 2. Perbandingan skor pemahaman kode etik sebelum dan sesudah pelatihan

Ke-	N	Skor Rata-rata (SD) Pre-test	Skor Rata-rata (SD) Post-test	Δ Skor	*p*-value
1	40	65,2 (10,4)	83,5 (7,2)	+18,3	< 0,001

Hasil analisis *paired t-test* menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang sangat signifikan dari pre-test ke post-test (t = XX, df = 39, $p < 0{,}001$). Selain itu, respon pendalaman secara kualitatif dari peserta menyebutkan bahwa pelatihan membantu mereka memahami bagaimana menjaga kerahasiaan konselling menyusun setting layanan yang sesuai etika, dan menghindari konflik kepentingan dalam layanan BK.

Hasil menunjukkan bahwa pelatihan kode etik ABKIN efektif meningkatkan pemahaman peserta tentang etika profesi konselor. Peningkatan ini sesuai dengan literatur yang menyebutkan bahwa pemahaman etika adalah fondasi bagi kualitas layanan BK [10][11]. Etika dan kompetensi konselor sebagai profesional saling terkait, dalam layanan BK virtual atau daring, aspek kerahasiaan menjadi sangat penting dan harus diatur dalam kode etik [12]. Penerapan kode etik ABKIN juga dianggap sebagai instrumen regulatif yang menjaga integritas profesi dan mutu

Vol. 1., No. 2, Oktober 2025, pp. 49-53 ISSN (print) | (online)

layanan BK [13]. Dengan meningkatnya pemahaman kode etik, konselor cenderung lebih sadar menjaga kerahasiaan, pengaturan setting layanan secara profesional, dan memperkuat sikap etis dalam interaksi layanan dengan peserta didik.

Namun, terdapat beberapa catatan penting dalam pemahaman kode etik saja tidak cukup jika tidak diikuti oleh budaya institusi yang mendukung penerapan etika (misalnya supervisi, monitoring pelaksanaan layanan). Pada sekolah, tekanan beban kerja konselor dan kurangnya pelatihan etika dapat menghambat implementasi kode etik secara optimal [14]. Adaptasi kode etik menujukkan layanan daring atau berbasis teknologi juga memerlukan modifikasi dan pemahaman tambahan terkait kerahasiaan dan media komunikasi [15]. Secara praktis, peningkatan pemahaman etika ini diharapkan dapat berkontribusi pada layanan BK yang aman, terpercaya, dan berkualitas - konseli merasakan layanan yang profesional, terlindungi, dan responsif terhadap kebutuhan mereka.

Selain itu, hasil diskusi kelompok dan refleksi individu menunjukkan adanya peningkatan kesadaran peserta terhadap pentingnya menjaga kerahasiaan dan keadilan dalam pelayanan konseling**. N**ilai-nilai ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan antara konselor dan klien. Para peserta menyadari bahwa pelanggaran kecil terhadap kode etik, seperti membocorkan informasi pribadi atau memberikan perlakuan tidak adil, dapat menurunkan kredibilitas profesi BK secara signifikan. Dengan demikian, pembinaan berkelanjutan terkait kode etik perlu dilakukan secara sistematis oleh lembaga pendidikan maupun organisasi profesi. Temuan ini juga sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa penerapan kode etik profesi berperan penting dalam peningkatan mutu layanan dan kepuasan klien [16]. Dalam konteks layanan BK, kode etik berfungsi sebagai jaminan moral dan hukum bagi konselor untuk menjalankan praktik profesional secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pemahaman etika profesi di kalangan konselor dan calon konselor, serta berkontribusi terhadap peningkatan standar layanan bimbingan dan konseling di Indonesia.

Peningkatan hasil *posttest* menunjukkan bahwa pelatihan efektif dalam memperkuat pemahaman peserta terhadap kode etik ABKIN. Kode etik berperan penting dalam menjaga profesionalisme konselor, melindungi hak konseli, dan memastikan kualitas layanan BK. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa etika profesi menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap profesi konseling[17]. Pelatihan berbasis simulasi dan studi kasus juga membantu peserta memahami penerapan kode etik dalam konteks nyata. Kegiatan ini relevan dengan hasil penelitian yang menegaskan perlunya penguatan etika profesi di lingkungan Pendidikan [18].

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap aspek-aspek penting kode etik, terutama dalam menjaga kerahasiaan, profesionalitas, dan tanggung jawab sosial konselor. Selain itu, peserta juga menunjukkan komitmen lebih tinggi dalam menerapkan nilai-nilai etika dalam situasi nyata di lingkungan kerja maupun lembaga pendidikan tempat mereka berpraktik.

4. Kesimpulan

Pelatihan kode etik ABKIN terbukti meningkatkan pemahaman guru BK terhadap etika profesi konselor secara signifikan. Penerapan kode etik yang lebih baik mendorong terciptanya layanan BK yang profesional, etis, dan berkualitas di sekolah.

ISSN (print) | (online) Vol. 1., No. 2, Oktober 2025, pp. 49-53

Saran dari pelaksanaan PkM ini antara lain:

a. **Bagi ABKIN**, perlu memperluas program pelatihan dan sosialisasi kode etik secara berkelanjutan agar setiap konselor memahami penerapan etika dalam berbagai situasi layanan, termasuk konteks digital.
b. **Bagi institusi pendidikan**, disarankan untuk memasukkan materi kode etik konselor dalam kegiatan pengembangan profesional dan supervisi layanan BK di sekolah.
c. **Bagi peneliti selanjutnya,** dapat dilakukan kajian lanjutan mengenai efektivitas pelatihan kode etik terhadap peningkatan kualitas layanan BK dengan pendekatan dan populasi yang lebih luas.

Referensi

[1] Safitri AH, Putri CR, Ningsih KP, Edith IR, Lestari W. Kode Etik Profesi Bimbingan Dan Konseling. At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan Humaniora 2025;9:41–53.
[2] Nurismawan AchS, Fahruni FE, Naqiyah N. Studi Aksiologi Etika Konselor dalam Memperbaiki Pemberian Layanan Konseling Individu di Sekolah. Jurnal Filsafat Indonesia 2022;5:65–70. https://doi.org/10.23887/jfi.v5i1.42036.
[3] Marjo HK, Sodiq D. Etika dan Kompetensi Konselor Sebagai Profesional (Suatu Pendekatan Literatur Sistematis). Jurnal Paedagogy 2022;9:86. https://doi.org/10.33394/jp.v9i1.4512.
[4] Syamila D, Marjo HK. Etika Profesi Bimbingan dan Konseling: Konseling Kelompok Online dan Asas Kerahasiaan. Jurnal Paedagogy 2022;9:116. https://doi.org/10.33394/jp.v9i1.4527.
[5] Nirwana H. Kode Etik Konseling: Teori dan Praktis. Inovasi Pendidikan 2021;8:1–7.
[6] Pradisty N, Hasibuan UM, Wanda NP. Professional Ethics Of Guidance And Counseling Teachers In Responding To Student Discipline Problems 2024;5:37–40.
[7] Alawiyah D, Rahmat HK, Pernanda S. MENEMUKENALI KONSEP ETIKA DAN SIKAP KONSELOR PROFESIONAL DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING. Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani 2020;6:84–101. https://doi.org/10.47435/mimbar.v6i2.457.
[8] Adelia RR, Saragih SN, Yamani R. PROFESSIONAL ETHICS AS A PILLAR OF COUNSELOR INTEGRITY IN GUIDANCE AND COUNSELING PRACTICE 2024:30–6.
[9] Putri A. Pentingnya Kualitas Pribadi Konselor Dalam Konseling Untuk Membangun Hubungan Antar Konselor Dan Konseli. JBKI (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia) 2016;1:10. https://doi.org/10.26737/jbki.v1i1.99.
[10] Siregar IA. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Bimbingan dan Konseling Sesuai dengan Standar Pendidikan. Al-Mursyid 2019;1.
[11] Megarizky Hotmauli. PENERAPAN KODE ETIK KONSELING OLEH GURU BIMBINGAN DAN KONSELING NON BK. JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 2021;2:605–11. https://doi.org/10.36312/10.36312/vol2iss12pp605-611.
[12] Jannah R, Marjo HK. Etika Profesi Konselor dalam Layanan Bimbingan Konseling Virtual. Jurnal Paedagogy 2022;9:55. https://doi.org/10.33394/jp.v9i1.4556.
[13] Sujadi E. KODE ETIK PROFESI KONSELING SERTA PERMASALAHAN DALAM PENERAPANNYA. Tarbawi : Jurnal Ilmu Pendidikan 2018;14:69–77. https://doi.org/10.32939/tarbawi.v14i2.298.
[14] Putra MA, Shofiria N. RAGAM PROFESIONALISME GURU BIMBINGAN DAN KONSELING ZAMAN NOW. Jurnal Bikotetik (Bimbingan Dan Konseling: Teori Dan Praktik) 2019;3:15–24. https://doi.org/10.26740/bikotetik.v3n1.p15-24.
[15] Sheilla A, Budiman N, Nadhirah NA. ETIKA KOMUNIKASI KONSELOR DALAM KONSELING ONLINE BERBASIS TEKS. JKP (Jurnal Konseling Pendidikan) 2023;7:1–12. https://doi.org/10.29408/jkp.v7i1.17812.
[16] Wibowo, R., & Lestari M. Pengaruh Game Mobile Legends terhadap Perilaku Komunikatif Mahasiswa. Jurnal Komunikasi Dan Media 2022;15:33–45.
[17] Wardani, Pujiastutik EF, Sholekha N. Efektifitas Model Pembelajaran Project Based Learning Terhadap. Primary Educational Journal 2024;4:321–543.

Vol. 1., No. 2, Oktober 2025, pp. 49-53 ISSN (print) | (online)

[18] Sari MP, Herdi H. Cyber Counseling : Solusi Konseling di Masa Pandemi. Jurnal Paedagogy 2021;8:579. https://doi.org/10.33394/jp.v8i4.3949.